



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2014
TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan program pemerintah mengenai kemudahan berusaha di Indonesia terkait dengan memulai usaha, akses perkreditan, dan penyelesaian perkara kepailitan, serta untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan memenuhi perkembangan hukum, perlu dilakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

b. berdasarkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5541) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5667).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5541) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5667), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

1. Ketentuan ayat (1) huruf e Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia meliputi penerimaan dari:
 - a. pelayanan jasa hukum;
 - b. pelayanan harta peninggalan;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. pelayanan keimigrasian;
 - e. pelayanan kekayaan intelektual;
 - f. pelayanan kesehatan rumah sakit; dan
 - g. kegiatan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pembinaan kemandirian warga binaan pemasyarakatan.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak atas kegiatan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pembinaan kemandirian warga binaan pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

2. Di . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

2. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 4A dan 4B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Terhadap Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelayanan kekayaan intelektual berupa biaya (jasa) tahunan Paten bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah dikenakan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif yang tercantum dalam Lampiran angka V huruf B nomor 25 huruf a dan nomor 26 huruf a Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 4B

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengenaan tarif pada pelayanan kekayaan intelektual bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan persetujuan Menteri Keuangan.

3. Ketentuan dalam Lampiran angka I mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Pelayanan Jasa Hukum diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

I. PELAYANAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-31-

6. Ketentuan dalam Lampiran angka V mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Pelayanan Kekayaan Intelektual diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|-------------------|---------------|
| V. PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL | | |
| A. HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI | | |
| 1. Permohonan Pendaftaran Suatu Ciptaan | | |
| a. Usaha Mikro dan Usaha Kecil | | |
| 1) Secara Elektronik (online) | Per Permohonan | Rp 200.000,00 |
| 2) Secara Non Elektronik (manual) | Per Permohonan | Rp 250.000,00 |
| b. Umum | | |
| 1) Secara Elektronik (online) | Per Permohonan | Rp 400.000,00 |
| 2) Secara Non Elektronik (manual) | Per Permohonan | Rp 500.000,00 |
| 2. Permohonan Pendaftaran Suatu Ciptaan Berupa Program Komputer | | |
| a. Usaha Mikro dan Usaha Kecil | | |
| 1) Secara Elektronik (online) | Per Permohonan | Rp 300.000,00 |
| 2) Secara Non Elektronik (manual) | Per Permohonan | Rp 350.000,00 |

b. Umum . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-32-

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF | |
|--|--------------------------------|-------|------------|
| b. Umum | | | |
| 1) Secara Elektronik (online) | Per Permohonan | Rp | 600.000,00 |
| 2) Secara Non Elektronik (manual) | Per Permohonan | Rp | 700.000,00 |
| 3. Permohonan Pencatatan Pemindahan Hak atas Suatu Ciptaan yang Terdaftar Dalam Daftar Umum Ciptaan. | Per Nomor Daftar | Rp | 150.000,00 |
| 4. Permohonan Perubahan Nama dan Alamat Suatu Ciptaan yang Terdaftar Dalam Daftar Umum Ciptaan. | Per Nomor Daftar | Rp | 100.000,00 |
| 5. Permohonan Petikan Tiap Pendaftaran Ciptaan Dalam Daftar Umum Ciptaan. | Per Nomor Daftar | Rp | 100.000,00 |
| 6. Permohonan Salinan Surat Pendaftaran Hak Cipta | Per Nomor Daftar | Rp | 100.000,00 |
| 7. Pencatatan Lisensi Hak Cipta. | Per Nomor Daftar | Rp | 100.000,00 |
| 8. Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Ciptaan Terdaftar | Per Permohonan | Rp | 100.000,00 |
| 9. Permohonan Perbaikan Data Permohonan Pendaftaran Ciptaan | Per Permohonan Hak Cipta | Rp | 100.000,00 |
| 10. Koreksi Surat Pendaftaran Ciptaan atas Kesalahan Data Permohonan Pendaftaran Ciptaan yang Disampaikan oleh Pemohon. | Per Nomor Daftar | Rp | 100.000,00 |

11. Permohonan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-33-

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|--|-------------------|-----------------|
| 11. Permohonan Pendaftaran Desain Industri | | |
| a. Usaha Mikro dan Usaha Kecil | | |
| 1) Secara Elektronik (<i>online</i>) | | |
| a) Satu Desain industri | Per Permohonan | Rp 250.000,00 |
| b) Satu Kesatuan Desain (Set) | Per Permohonan | Rp 550.000,00 |
| 2) Secara Non Elektronik (Manual) | | |
| a) Satu Desain industri | Per Permohonan | Rp 300.000,00 |
| b) Satu Kesatuan Desain (Set) | Per Permohonan | Rp 600.000,00 |
| b. Umum | | |
| 1) Secara Elektronik (<i>online</i>) | | |
| a) Satu Desain industri | Per Permohonan | Rp 800.000,00 |
| b) Satu Kesatuan Desain (Set) | Per Permohonan | Rp 1.250.000,00 |
| 2) Secara Non Elektronik (Manual) | | |
| a) Satu Desain industri | Per Permohonan | Rp 1.000.000,00 |
| b) Satu Kesatuan Desain (Set) | Per Permohonan | Rp 1.500.000,00 |

12. Pengajuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-34-

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|--|--------------------------------|---------------|
| 12. Pengajuan Keberatan atas Permohonan Desain Industri yang Diumumkan | | |
| a. UMKM | Per Permohonan | Rp 150.000,00 |
| b. Non UMKM | Per Permohonan | Rp 500.000,00 |
| 13. Permohonan Petikan Daftar Umum Desain Industri | Per Permohonan | Rp 150.000,00 |
| 14. Permohonan Dokumen Prioritas Desain Industri | Per Permohonan Desain Industri | Rp 150.000,00 |
| 15. Permohonan Salinan Sertifikat Desain Industri | Per Sertifikat | Rp 150.000,00 |
| 16. Pencatatan Pengalihan Hak Desain Industri | | |
| a. UMKM | Per Nomor Daftar | Rp 200.000,00 |
| b. Non UMKM | Per Nomor Daftar | Rp 550.000,00 |
| 17. Pencatatan Surat Perjanjian Lisensi Desain Industri. | Per Nomor Daftar | Rp 350.000,00 |
| 18. Perubahan Nama dan atau Alamat Desain Industri | | |
| a. UMKM | Per Nomor Daftar | Rp 100.000,00 |
| b. Non UMKM | Per Nomor Daftar | Rp 200.000,00 |

19. Pembatalan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-35-

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|--|---|---------------|
| 19. Pembatalan Desain Industri | | |
| a. UMKM | Per Permohonan | Rp 0,00 |
| b. Non UMKM | Per Permohonan | Rp 200.000,00 |
| 20. Pengajuan Keberatan atas Putusan Penolakan Permohonan Desain Industri yang Ditolak Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 4 | | |
| a. UMKM | Per Permohonan Desain Industri | Rp 200.000,00 |
| b. Non UMKM | Per Permohonan Desain Industri | Rp 400.000,00 |
| 21. Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Desain Industri Terdaftar | Per Nomor Daftar | Rp 200.000,00 |
| 22. Permohonan Perbaikan Data Permohonan Desain Industri | Per Nomor Daftar | Rp 200.000,00 |
| 23. Koreksi Sertifikat Pendaftaran Desain Industri atas Kesalahan Data Permohonan Pendaftaran Desain Industri yang Disampaikan Pemohon | Per Nomor Daftar | Rp 400.000,00 |
| B. PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU, DAN RAHASIA DAGANG | | |
| 1. Permohonan | | |
| a. Permohonan Paten | | |

1) Usaha . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-36-

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|--|-------------------|-----------------|
| 1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah | | |
| a) Secara Elektronik (<i>online</i>) | Per Permohonan | Rp 350.000,00 |
| b) Secara non Elektronik (manual) | Per Permohonan | Rp 450.000,00 |
| 2) Umum | | |
| a) Secara Elektronik (<i>online</i>) | Per Permohonan | Rp 1.250.000,00 |
| b) Secara non Elektronik (manual) | Per Permohonan | Rp 1.500.000,00 |
| b. Permohonan Paten Sederhana | | |
| 1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah | | |
| a) Secara Elektronik (<i>online</i>) | Per Permohonan | Rp 200.000,00 |
| b) Secara non Elektronik (manual) | Per Permohonan | Rp 250.000,00 |
| 2) Umum | | |
| a) Secara Elektronik (<i>online</i>) | Per Permohonan | Rp 800.000,00 |
| b) Secara non Elektronik (manual) | Per Permohonan | Rp 1.250.000,00 |
| 2. Tambahan Biaya Deskripsi Permohonan yang Lebih Dari 30 (Tiga Puluh) Halaman | Per Lembar | Rp 5.000,00 |

3. Tambahan. . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-37-

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|----------------|-----------------|
| 3. Tambahan Biaya Setiap Klaim | Per Klaim | Rp 50.000,00 |
| 4. Denda Terhadap Keterlambatan Pemenuhan Persyaratan Permohonan | Per Permohonan | Rp 200.000,00 |
| 5. Percepatan Pengumuman yang Dilaksanakan Segera Setelah 6 (enam) Bulan | Per Permohonan | Rp 200.000,00 |
| 6. Permohonan Perubahan Data Permohonan | Per Permohonan | Rp 100.000,00 |
| 7. Permohonan Surat Keterangan Pemakai Terdahulu | Per Permohonan | Rp 3.000.000,00 |
| 8. Permohonan Surat Bukti Hak Prioritas | Per Permohonan | Rp 250.000,00 |
| 9. Permohonan Surat Keterangan Resmi untuk Memperoleh Contoh Jasad Renik | Per Permohonan | Rp 100.000,00 |
| 10. Pemeriksaan Substantif | | |
| a. Permohonan Paten | Per Permohonan | Rp 2.000.000,00 |
| b. Permohonan Paten Sederhana | Per Permohonan | Rp 350.000,00 |
| 11. Perubahan Jenis Permohonan Paten | Per Permohonan | Rp 450.000,00 |
| 12. Permohonan Banding | Per Permohonan | Rp 3.000.000,00 |
| 13. Koreksi Sertifikat atas Kesalahan Data Aplikasi yang Disampaikan oleh Pemohon | Per Permohonan | Rp 500.000,00 |

14. Koreksi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-38-

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF | |
|--|----------------|-------|--------------|
| 14. Koreksi <i>Frontpage</i> atas Kesalahan Data Aplikasi yang Disampaikan oleh Pemohon (Khusus Terhadap Data Yang Tidak Tercantum Dalam Sertifikat) | Per Permohonan | Rp | 150.000,00 |
| 15. Permohonan Perubahan Data Bibliografi Paten | Per Paten | Rp | 150.000,00 |
| 16. Permohonan Pembatalan Sebagian Berupa Pengurangan Klaim | Per Klaim | Rp | 100.000,00 |
| 17. Permohonan Pencatatan Pengalihan Paten. | Per Permohonan | Rp | 500.000,00 |
| 18. Pendaftaran Pencatatan Perjanjian Lisensi | Per Permohonan | Rp | 1.000.000,00 |
| 19. Permohonan Petikan Pencatatan Perjanjian Lisensi | Per Permohonan | Rp | 150.000,00 |
| 20. Permohonan Lisensi Wajib | Per Permohonan | Rp | 1.000.000,00 |
| 21. Permohonan Petikan Daftar Umum Paten | Per Permohonan | Rp | 300.000,00 |
| 22. Permohonan Salinan Sertifikat Paten | Per Permohonan | Rp | 150.000,00 |
| 23. Permohonan Salinan Dokumen Paten | Per Lembar | Rp | 10.000,00 |
| 24. Biaya (Jasa) Penelusuran | | | |
| a. Permohonan atas Penelusuran Paten yang di Umumkan di Dalam Negeri | Per Subyek | Rp | 250.000,00 |
| b. Penelusuran Paten secara <i>online</i> | Per Subyek | Rp | 0,00 |

25. Biaya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-39-

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|-----------|---------|
| 25. Biaya (Jasa) Tahunan Paten | | |
| a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah | | |
| 1) Tahun Ke-1 (Tahun Pertama Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 0,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 0,00 |
| 2) Tahun Ke-2 (Tahun Kedua Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 0,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 0,00 |
| 3) Tahun Ke-3 (Tahun Ketiga Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 0,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 0,00 |
| 4) Tahun Ke-4 (Tahun Keempat Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 0,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 0,00 |
| 5) Tahun Ke-5 (Tahun Kelima Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 0,00 |

b) Biaya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-40-

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|-----------|-----------------|
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 0,00 |
| 6) Tahun Ke-6 (Tahun Keenam Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 1.500.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 150.000,00 |
| 7) Tahun Ke-7 (Tahun Ketujuh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 2.000.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 200.000,00 |
| 8) Tahun Ke-8 (Tahun Kedelapan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 2.000.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 200.000,00 |
| 9) Tahun Ke-9 (Tahun Kesembilan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 2.500.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 250.000,00 |
| 10) Tahun Ke-10 (Tahun Kesepuluh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 3.500.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 250.000,00 |

11) Tahun . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-41-

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|-----------|-----------------|
| 11) Tahun Ke-11 (Tahun Kesebelas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 5.000.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 250.000,00 |
| 12) Tahun Ke-12 (Tahun Kedua Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 5.000.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 250.000,00 |
| 13) Tahun Ke-13 (Tahun Ketiga Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 5.000.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 250.000,00 |
| 14) Tahun Ke-14 (Tahun Keempat Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 5.000.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 250.000,00 |
| 15) Tahun Ke-15 (Tahun Kelima Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 5.000.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 250.000,00 |

16) Tahun . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-42-

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|--|-----------|-----------------|
| 16) Tahun Ke-16 (Tahun Keenam Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 5.000.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 250.000,00 |
| 17) Tahun Ke-17 (Tahun Ketujuh Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 5.000.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 250.000,00 |
| 18) Tahun Ke-18 (Tahun Kedelapan Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 5.000.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 250.000,00 |
| 19) Tahun Ke-19 (Tahun Kesembilan Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 5.000.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 250.000,00 |
| 20) Tahun Ke-20 (Tahun Kedua Puluh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 5.000.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 250.000,00 |

b. Umum . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-43-

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|-----------|-----------------|
| b. Umum | | |
| 1) Tahun Ke-1 (Tahun Pertama Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 700.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 50.000,00 |
| 2) Tahun Ke-2 (Tahun Kedua Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 700.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 50.000,00 |
| 3) Tahun Ke-3 (Tahun Ketiga Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 700.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 50.000,00 |
| 4) Tahun Ke-4 (Tahun Keempat Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 1.000.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 100.000,00 |
| 5) Tahun Ke-5 (Tahun Kelima Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 1.000.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 100.000,00 |

6) Tahun . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-44-

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|-----------|-----------------|
| 6) Tahun Ke-6 (Tahun Keenam Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 1.500.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 150.000,00 |
| 7) Tahun Ke-7 (Tahun Ketujuh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 2.000.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 200.000,00 |
| 8) Tahun Ke-8 (Tahun Kedelapan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 2.000.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 200.000,00 |
| 9) Tahun Ke-9 (Tahun Kesembilan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 2.500.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 250.000,00 |
| 10) Tahun Ke-10 (Tahun Kesepuluh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 3.500.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 250.000,00 |

11) Tahun . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-45-

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|-----------|-----------------|
| 11) Tahun Ke-11 (Tahun Kesebelas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 5.000.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 250.000,00 |
| 12) Tahun Ke-12 (Tahun Kedua Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 5.000.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 250.000,00 |
| 13) Tahun Ke-13 (Tahun Ketiga Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 5.000.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 250.000,00 |
| 14) Tahun Ke-14 (Tahun Keempat Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 5.000.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 250.000,00 |
| 15) Tahun Ke-15 (Tahun Kelima Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 5.000.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 250.000,00 |

16) Tahun . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-46-

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|--|-----------|-----------------|
| 16) Tahun Ke-16 (Tahun Keenam Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 5.000.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 250.000,00 |
| 17) Tahun Ke-17 (Tahun Ketujuh Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 5.000.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 250.000,00 |
| 18) Tahun Ke-18 (Tahun Kedelapan Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 5.000.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 250.000,00 |
| 19) Tahun Ke-19 (Tahun Kesembilan Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 5.000.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 250.000,00 |
| 20) Tahun Ke-20 (Tahun Kedua Puluh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 5.000.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 250.000,00 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-47-

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|-----------|---------|
| 26. Biaya (Jasa) Tahunan Paten Sederhana | | |
| a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan dan Litbang Pemerintah | | |
| 1) Tahun Ke-1 (Tahun Pertama Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 0,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 0,00 |
| 2) Tahun Ke-2 (Tahun Kedua Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 0,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 0,00 |
| 3) Tahun Ke-3 (Tahun Ketiga Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 0,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 0,00 |
| 4) Tahun Ke-4 (Tahun Keempat Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 0,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 0,00 |
| 5) Tahun Ke-5 (Tahun Kelima Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |

a) Dasar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-48-

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|-----------|-----------------|
| a) Dasar | Per Paten | Rp 0,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 0,00 |
| 6) Tahun Ke-6 (Tahun Keenam Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 1.650.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 50.000,00 |
| 7) Tahun Ke-7 (Tahun Ketujuh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 2.200.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 50.000,00 |
| 8) Tahun Ke-8 (Tahun Kedelapan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 2.750.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 50.000,00 |
| 9) Tahun Ke-9 (Tahun Kesembilan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 3.300.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 50.000,00 |
| 10) Tahun Ke-10 (Tahun Kesepuluh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 3.850.000,00 |

b) Biaya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-49-

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|-----------|-----------------|
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 50.000,00 |
| b. Umum | | |
| 1) Tahun Ke-1 (Tahun Pertama Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 550.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 50.000,00 |
| 2) Tahun Ke-2 (Tahun Kedua Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 550.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 50.000,00 |
| 3) Tahun Ke-3 (Tahun Ketiga Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 550.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 50.000,00 |
| 4) Tahun Ke-4 (Tahun Keempat Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 550.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 50.000,00 |
| 5) Tahun Ke-5 (Tahun Kelima Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 1.100.000,00 |

b) Biaya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-50-

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---|-----------|-----------------|
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 50.000,00 |
| 6) Tahun Ke-6 (Tahun Keenam Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 1.650.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 50.000,00 |
| 7) Tahun Ke-7 (Tahun Ketujuh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 2.200.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 50.000,00 |
| 8) Tahun Ke-8 (Tahun Kedelapan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 2.750.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 50.000,00 |
| 9) Tahun Ke-9 (Tahun Kesembilan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 3.300.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 50.000,00 |
| 10) Tahun Ke-10 (Tahun Kesepuluh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) | | |
| a) Dasar | Per Paten | Rp 3.850.000,00 |
| b) Biaya Tiap Klaim | Per Klaim | Rp 50.000,00 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-51-

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|--|----------------|--|
| 27. Denda Keterlambatan atas Pembayaran Biaya (Jasa) Tahunan Pemeliharaan Paten atau Paten Sederhana | Per Paten | Rp 2,5 % Per Bulan Dari Kewajiban yang harus dibayar |
| 28. Biaya (Jasa) Administrasi Permohonan Paten Melalui <i>Paten Cooperation Treaty (PCT)</i> | Per Permohonan | Rp 1.000.000,00 |
| 29. Permohonan Pelaksanaan Paten Secara Regional | Per Permohonan | Rp 3.000.000,00 |
| 30. Keterlambatan Permohonan Paten Melalui PCT Fase Nasional Dikarenakan Unsur Ketidaksengajaan (<i>Unintentional & Do Care</i>) | Per Permohonan | Rp 5.000.000,00 |
| 31. Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu | | |
| a. UMKM | Per Permohonan | Rp 400.000,00 |
| b. Non UMKM | Per Permohonan | Rp 700.000,00 |
| 32. Permohonan Petikan Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu | Per Permohonan | Rp 200.000,00 |
| 33. Permohonan Salinan Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu | | |
| a. UMKM | Per Permohonan | Rp 100.000,00 |
| b. Non UMKM | Per Permohonan | Rp 200.000,00 |

34. Pencatatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-52-

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|--|----------------|---------------|
| 34. Pencatatan Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu | | |
| a. UMKM | Per Permohonan | Rp 250.000,00 |
| b. Non UMKM | Per Permohonan | Rp 500.000,00 |
| 35. Pencatatan Perjanjian Lisensi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu | | |
| a. UMKM | Per Permohonan | Rp 150.000,00 |
| b. Non UMKM | Per Permohonan | Rp 250.000,00 |
| 36. Perubahan Nama dan atau Alamat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu | | |
| a. UMKM | Per Permohonan | Rp 150.000,00 |
| b. Non UMKM | Per Permohonan | Rp 250.000,00 |
| 37. Pembatalan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu | | |
| a. UMKM | Per Permohonan | Rp 0,00 |
| b. Non UMKM | Per Permohonan | Rp 200.000,00 |
| 38. Pencatatan Pengalihan Hak Rahasia Dagang | | |
| a. UMKM | Per Permohonan | Rp 200.000,00 |
| b. Non UMKM | Per Permohonan | Rp 400.000,00 |

39. Pencatatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-53-

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|--|----------------|-----------------|
| 39. Pencatatan Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang | | |
| a. UMKM | Per Permohonan | Rp 150.000,00 |
| b. Non UMKM | Per Permohonan | Rp 250.000,00 |
| C. MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS | | |
| 1. Permohonan Pendaftaran Merek dan Permintaan Perpanjangan Perlindungan Merek Terdaftar | | |
| a. Usaha Mikro dan Usaha Kecil | | |
| 1) Secara Elektronik (<i>online</i>) | Per Kelas | Rp 500.000,00 |
| 2) Secara non Elektronik (Manual) | Per Kelas | Rp 600.000,00 |
| b. Umum | | |
| 1) Secara Elektronik (<i>online</i>) | Per Kelas | Rp 1.800.000,00 |
| 2) Secara non Elektronik (Manual) | Per Kelas | Rp 2.000.000,00 |
| 2. Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis | | |
| 1) Secara Elektronik (<i>online</i>) | Per Kelas | Rp 450.000,00 |
| 2) Secara non Elektronik (Manual) | Per Kelas | Rp 500.000,00 |
| 3. Perpanjangan Perlindungan Merek/Merek Kolektif terdaftar | | |
| a. Dalam jangka waktu 6 bulan sebelum/sampai dengan berakhirnya perlindungan Merek | | |
| 1) Usaha Mikro dan Usaha Kecil | | |
| a) Secara Elektronik (<i>online</i>) | Per Kelas | Rp 1.000.000,00 |
| b) Secara non Elektronik (Manual) | Per Kelas | Rp 1.200.000,00 |

2) Umum . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-54-

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|--|--------------------------------|-----------------|
| 2) Umum | | |
| a) Secara Elektronik (<i>online</i>) | Per Kelas | Rp 2.250.000,00 |
| b) Secara non Elektronik (Manual) | Per Kelas | Rp 2.500.000,00 |
| b. Dalam jangka waktu 6 bulan setelah berakhirnya perlindungan Merek | | |
| 1) Usaha Mikro dan Usaha Kecil | | |
| a) Secara Elektronik (<i>online</i>) | Per Kelas | Rp 1.500.000,00 |
| b) Secara non Elektronik (Manual) | Per Kelas | Rp 1.800.000,00 |
| 2) Umum | | |
| a) Secara Elektronik (<i>online</i>) | Per Kelas | Rp 3.000.000,00 |
| b) Secara non Elektronik (Manual) | Per Kelas | Rp 4.000.000,00 |
| 4. Pengajuan Keberatan atas Permohonan Merek/Merek Kolektif/Indikasi Geografis | Per Permohonan | Rp 1.000.000,00 |
| 5. Permohonan Banding Merek/Merek Kolektif/Indikasi Geografis | Per Permohonan | Rp 3.000.000,00 |
| 6. Biaya Pencatatan dalam Daftar Umum Merek | | |
| a. Pencatatan Perubahan Nama dan/atau Alamat Pemilik Merek | Per Permohonan Per Nomor | Rp 300.000,00 |
| b. Pencatatan Pengalihan Hak/Penggabungan Perusahaan (Merger) atas Merek/Merek Kolektif Terdaftar | Per Nomor Daftar | Rp 650.000,00 |

c. Pencatatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-55-

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF | |
|--|--|-------|------------|
| c. Pencatatan Perjanjian Lisensi | Per Nomor Daftar | Rp | 500.000,00 |
| d. Pencatatan Penghapusan Pendaftaran Merek dan/atau Merek Kolektif dan/atau Indikasi Geografis | Per Permohonan Per Nomor | Rp | 200.000,00 |
| e. Pencatatan Perubahan Peraturan Penggunaan Merek Kolektif | Per Nomor Daftar | Rp | 300.000,00 |
| 7. Permohonan Petikan Resmi dan Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Merek | | | |
| a. Permohonan Petikan Resmi Pendaftaran Merek/Merek Kolektif/Indikasi Geografis | Per Permohonan Per Nomor | Rp | 200.000,00 |
| b. Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai | | | |
| 1) Klasifikasi Barang dan/atau Jasa | Per Permohonan Per Kelas | Rp | 200.000,00 |
| 2) Barang dan/atau Jasa Sejenis | Per Permohonan Per Kelas | Rp | 200.000,00 |
| 3) Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar | Per Permohonan Per Nomor Daftar | Rp | 200.000,00 |
| c. Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Daftar Umum Merek/Indikasi Geografis | Per Permohonan Per Nomor | Rp | 200.000,00 |

8. Perubahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-56-

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF | |
|--|----------------------------|-------|------------|
| 8. Perubahan Data Permohonan Pendaftaran Merek atau Indikasi Geografis Karena Kesalahan Penulisan oleh Pemohon yang Tidak Berdampak Perubahan Kepemilikan/Kuasa | Per Permohonan Pendaftaran | Rp | 200.000,00 |
| 9. Perubahan Data pada Buku Persyaratan Indikasi Geografis Karena Kesalahan Penulisan Oleh Pemohon | Per Permohonan Per Nomor | Rp | 200.000,00 |
| 10. Perubahan Data Permohonan Pendaftaran Merek, Merek Kolektif atau Indikasi Geografis Pada Sertifikat Karena Kesalahan Penulisan oleh Pemohon yang Tidak Berdampak Perubahan Kepemilikan/Kuasa | Per Permohonan Pendaftaran | Rp | 300.000,00 |
| 11. Biaya Salinan Bukti Prioritas Permohonan Merek | Per Permohonan Per Nomor | Rp | 300.000,00 |
| 12. Permohonan Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis | Per Permohonan | Rp | 750.000,00 |
| 13. Pencatatan Perubahan Buku Persyaratan Indikasi Geografis | Per Permohonan | Rp | 200.000,00 |
| 14. Pencatatan Pemakaian Indikasi Geografis | Per Permohonan | Rp | 750.000,00 |
| 15. Pendaftaran Konsultan Kekayaan Intelektual | Per Orang | Rp | 0,00 |

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-57-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2016
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 227.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Perekonomian,
Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,



Lydia Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2014
TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan program pemerintah mengenai Kemudahan Berusaha di Indonesia terkait dengan memulai usaha, akses perkreditan, dan penyelesaian perkara kepailitan, serta untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan memenuhi perkembangan hukum, perlu dilakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Hal ini sejalan dengan upaya mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Peraturan Pemerintah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5940.